

**PERAN *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION* (ILO) DALAM
MENANGANI EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI PERTAMBANGAN
KOBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO 2018-2024**

Oleh : Aditama Novindri Firmansyah

Pembimbing : Dr. Mohammad Saeri, M.Hum

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Eksplorasi pekerja anak di pertambangan kobalt Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan paradoks global di mana transisi energi hijau negara maju bergantung pada rantai pasok yang ditopang eksploitasi hingga 40.000 anak dalam kondisi berbahaya. Kemiskinan ekstrem mencapai 72,9% populasi, lemahnya penegakan hukum, dan absennya fungsi perlindungan negara menjadikan kasus RDK sebagai yang paling berat di dunia, membuka ruang intervensi bagi *International Labour Organization* (ILO) sebagai aktor internasional dengan mandat khusus ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan serta berlandaskan teori organisasi internasional dari Barnett dan Finnemore yang memposisikan ILO sebagai aktor otonom dengan kekuasaan normatif dan epistemik, dilengkapi perspektif konstruktivisme untuk memahami proses sosialisasi norma pelarangan pekerja anak. Melalui pendekatan ini, ILO dianalisis berdasarkan tiga fungsi utama: menciptakan dan menyebarkan norma global, mengawasi kepatuhan negara melalui mekanisme pengawasan teknis, dan mengisi kekosongan institusional negara melalui program COTECCO dan GALAB.

Temuan penelitian menunjukkan ILO berhasil mentransformasi diskursus pekerja anak dari isu ekonomi keluarga menjadi pelanggaran hak asasi manusia serius melalui harmonisasi hukum nasional dengan Konvensi No. 138 dan No. 182. ILO mengembangkan sistem *Child Labour Monitoring and Remediation Systems* (CLMRS), menarik 1.527 anak dari tambang, mencegah 6.464 anak memasuki pekerja anak, serta memperkuat kapasitas institusional pemerintah dan dukungan ekonomi keluarga. Efektivitas terbukti secara kualitatif dalam memperbaiki kondisi perlindungan anak di wilayah intervensi, meskipun dibatasi oleh instabilitas politik, lemahnya penegakan hukum, dan kompleksitas rantai pasok global kobalt.

Kata Kunci: *International Labour Organization*, Organisasi Internasional, Pekerja Anak, Pertambangan Kobalt, Republik Demokratik Kongo

ABSTRACT

Child labor exploitation in cobalt mining in the Democratic Republic of Congo (DRC) represents a global paradox where the green energy transition in developed countries depends on supply chains supported by the exploitation of up to 40,000 children in hazardous conditions. Extreme poverty reaches 72.9% of the population, weak law enforcement, and the absence of state protection functions make the DRC case the most severe in the world, opening space for intervention by the International Labour Organization (ILO) as an international actor with a specific employment mandate.

This study employs a qualitative method with a literature review approach and is grounded in the international organization theory of Barnett and Finnemore, which positions the ILO as an autonomous actor with normative and epistemic power, complemented by a constructivist perspective to understand the process of socialization of norms prohibiting child labor. Through this framework, the ILO is analyzed based on three main functions: creating and disseminating global norms, overseeing state compliance through technical oversight mechanisms, and filling institutional gaps through the COTECCO and GALAB programs.

The findings show that the ILO successfully transformed the discourse on child labor from a family economic issue to a serious human rights violation through harmonizing national law with Conventions No. 138 and No. 182. The ILO developed the Child Labour Monitoring and Remediation Systems (CLMRS), withdrew 1,527 children from mines, prevented 6,464 children from entering child labor, and strengthened government institutional capacity and family economic support. Effectiveness has been qualitatively proven in improving child protection conditions in intervention areas, although limited by political instability, weak law enforcement, and the complexity of global cobalt supply chains.

Keywords: *International Labour Organization, International Organization, Child Labor, Cobalt Mining, Democratic Republic of The Congo*

PENDAHULUAN

Eksplorasi pekerja anak di sektor pertambangan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling persisten dan mengkhawatirkan dalam lanskap ketenagakerjaan global saat ini. Isu ini menjadi perhatian dunia internasional karena melibatkan perampasan hak dasar anak untuk tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan dari bahaya fisik maupun mental. Fenomena pekerja anak di pertambangan memang terjadi di berbagai negara

berkembang, namun kasus yang terjadi di Republik Demokratik Kongo (RDK) menunjukkan tingkat keparahan (*severity*) yang jauh melampaui rata-rata global.¹ Skala pelibatan anak, beratnya beban kerja, dan tingginya risiko kematian di RDK menciptakan anomali yang menuntut perhatian khusus dari komunitas internasional.

¹ Or Salama, "The Current State of Child Labour in Cobalt Mines in the Democratic Republic of the Congo - Humanium," May 27, 2025, <https://www.humanium.org>

Republik Demokratik Kongo memegang posisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat strategis sebagai pemilik cadangan mineral terbesar di dunia. Negara ini menguasai lebih dari 70 persen cadangan kobalt global yang merupakan komponen vital bagi industri teknologi masa depan.² Kobalt berfungsi sebagai bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion yang digunakan dalam telepon pintar, laptop, hingga kendaraan listrik (Electric Vehicles/EV). Permintaan dunia terhadap kobalt diproyeksikan terus melonjak seiring dengan agenda transisi energi global menuju *net-zero emission* yang digaungkan oleh negara-negara maju.

Paradoks muncul ketika keberlanjutan lingkungan di negara maju bergantung pada rantai pasok yang ditopang eksploitasi hingga 40.000 anak di pertambangan artisanal dalam kondisi berbahaya yang melanggar Konvensi ILO No. 138 dan No. 182.³ Anak-anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya seperti menggali terowongan sempit, mengangkut beban berat, dan terpapar zat kimia beracun tanpa perlindungan memadai. Kondisi kerja yang tidak manusiawi ini tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan mental mereka, tetapi juga merampas hak dasar atas pendidikan dan masa depan yang layak.

Pemerintah RDK secara yuridis telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 sejak tahun 2001, yang berarti negara memiliki kewajiban hukum mengikat untuk menegakkan aturan tersebut dalam legislasi nasionalnya.⁴ Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang lebar antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dengan penegakan hukum di lapangan (*law in action*). Lemahnya kapasitas institusi pengawas ketenagakerjaan, korupsi, dan luasnya wilayah pertambangan informal membuat hukum seolah tidak berdaya menyentuh sektor Artisanal and Small-scale Mining (ASM) tempat ribuan anak bekerja setiap harinya.

Ketidakberdayaan negara ini membuka ruang urgensi bagi kehadiran aktor internasional untuk melakukan intervensi kemanusiaan dan teknis guna mengatasi krisis pekerja anak. International Labour Organization (ILO) hadir sebagai entitas supranasional yang memiliki legitimasi unik dan kuat dalam tata kelola global.⁵ ILO merupakan badan khusus (*specialized agency*) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat spesifik untuk menetapkan standar ketenagakerjaan internasional.

Intervensi ILO di RDK pada periode 2018-2024 terwujud melalui berbagai proyek spesifik seperti

² Arthur Kearney & Nicolaj Sebrell, "The Cobalt Conundrum: Net Zero Necessity vs Supply Chain Concerns," October 6, 2022, <https://insights.issgovernance.com>

³ Save The Children, "DRC Cobalt Mines, Child Labour and the Green Transition Save the Children International," November 4, 2024, <https://www.savethechildren.net>

⁴ International Trade Union Confederation. 2010. *Internationally recognised core labour standards in the Democratic Republic of Congo*. <https://www.ituc-csi.org>

⁵ Guy Standing, "The International Labour Organization," *New Political Economy*, 15, no. 2 (June 1, 2010): 307–18, <https://doi.org/10.1080/13563460903290961>

COTECCO (Combating Child Labor in the Cobalt Supply Chain) yang didanai oleh mitra internasional.⁶ Program ini tidak hanya berfokus pada pelarangan represif, tetapi berusaha membangun sistem pemantauan pekerja anak berbasis komunitas (*Child Labour Monitoring and Remediation Systems/CLMRS*). Pada tahun 2024, ILO memperluas upayanya dengan meluncurkan proyek GALAB yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sosial dan sistem pemantauan di rantai pasok kobalt.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana ILO menjalankan perannya dalam menangani eksploitasi pekerja anak di pertambangan kobalt RDK pada periode 2018-2024, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program-program tersebut.

KERANGKA TEORI

Perspektif Konstruktivisme

Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme untuk memahami peran International Labour Organization (ILO) sebagai aktor normatif dalam sistem internasional. Perspektif konstruktivisme menekankan bahwa interaksi antar aktor dalam hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh kepentingan material seperti

kekuatan militer atau ekonomi, melainkan juga oleh ide, norma, dan identitas yang dibangun secara sosial. Artinya, perilaku negara terhadap isu pekerja anak tidak hanya bergantung pada kalkulasi untung-rugi ekonomi, melainkan juga pada bagaimana mereka memaknai norma internasional tentang perlindungan anak.⁷

Menurut Alexander Wendt, struktur dalam hubungan internasional bersifat anarkis hanya jika aktor mempersepsikannya demikian, karena pada dasarnya struktur tersebut dikonstruksi secara sosial melalui ide dan identitas.⁸ Hal ini bermakna bahwa norma tentang pelarangan pekerja anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi ILO No. 138 dan 182 bukan hanya produk hukum formal, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan proses belajar antarnegara. Dalam hal ini, ILO berfungsi sebagai pembentuk norma global (*norm entrepreneur*) yang mendorong perubahan perilaku negara, termasuk Republik Demokratik Kongo, untuk menginternalisasi nilai-nilai perlindungan anak.

Perspektif konstruktivisme memungkinkan peneliti untuk memahami bahwa eksistensi pekerja anak dalam industri kobalt bukan hanya permasalahan ekonomi atau

⁶ United States Department of Labor, *BUREAU OF INTERNATIONAL LABOR AFFAIRS FINAL EVALUATION COMBATTING CHILD LABOR IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO'S COBALT INDUSTRY (COTECCO)*, 2022

⁷ Alexander Wendt, "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics," *International Organization* 46, no. 2 (1992): 391–425

⁸ Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization* 52, no. 4 (1998): 887–917

kelemahan hukum semata, melainkan juga kegagalan internalisasi norma oleh negara. ILO berupaya membentuk ulang struktur makna yang ada, dengan menekankan bahwa eksploitasi anak tidak dapat diterima secara moral dan sosial dalam sistem internasional modern.

Teori: Organisasi Internasional

Teori tentang peran organisasi internasional telah mengalami perkembangan penting dari sekadar melihat organisasi internasional (OI) sebagai instrumen negara, menjadi melihatnya sebagai aktor otonom dengan kekuasaan normatif dan administratif.⁹ Salah satu teori yang menyoroti hal ini secara mendalam dikemukakan oleh Michael Barnett dan Martha Finnemore melalui pendekatan konstruktivis dalam bukunya *Rules for the World: International Organizations in Global Politics* (2004). Menurut mereka, organisasi internasional seperti ILO tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis negara-negara anggota, melainkan juga sebagai entitas birokratis yang memiliki otoritas moral, keahlian teknis, serta kemampuan untuk membentuk dan menyebarkan norma internasional.

Barnett dan Finnemore mengemukakan bahwa organisasi internasional memiliki tiga fungsi utama yang menjelaskan kekuasaan dan peran otonomnya dalam sistem internasional. Pertama, mereka menciptakan norma global, yakni seperangkat nilai dan aturan yang menjadi standar perilaku

internasional. Kedua, mereka memiliki wewenang untuk mengatur dan menilai tindakan negara, termasuk dalam mengkritisi atau menekan negara agar menaati norma tersebut. Ketiga, dan yang paling relevan dengan kasus Republik Demokratik Kongo (RDK), organisasi internasional mampu mengisi kekosongan ketika negara gagal bertindak, terutama dalam isu kemanusiaan seperti eksploitasi pekerja anak.

Berdasarkan teori ini, peran ILO dalam konteks eksploitasi pekerja anak di pertambangan kobalt Republik Demokratik Kongo tahun 2018–2024 dapat dipahami sebagai manifestasi kekuasaan normatif dan birokratis organisasi internasional. Republik Demokratik Kongo, meskipun secara formal telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan 182, gagal melaksanakan kewajibannya dalam melindungi anak dari praktik kerja berbahaya, khususnya di sektor pertambangan kobalt yang bersifat informal dan tidak terawasi. ILO tidak hanya menyuarakan kecaman, tetapi turun langsung melalui program-program teknis dan kemitraan dengan LSM, pemerintah lokal, dan komunitas internasional untuk memberikan advokasi, pendidikan, rehabilitasi, serta pengembangan kebijakan.

Tingkat Analisa: Kelompok

Level analisis merupakan suatu pendekatan penting dalam studi hubungan internasional karena menentukan fokus utama dari suatu penelitian. Menurut Mohtar Mas'od, terdapat lima tingkatan analisis dalam hubungan internasional: perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa,

⁹Michael N. Barnett & Martha Finnemore, *Rules for the World: International Organizations in Global Politics* (Cornell University Press, 2004)

pengelompokan negara, dan sistem internasional. Penelitian ini menggunakan level analisis perilaku kelompok, karena fokus utama terletak pada International Labour Organization (ILO) sebagai organisasi internasional, khususnya dalam kapasitasnya sebagai aktor kolektif yang memiliki mandat, struktur kelembagaan, dan strategi kebijakan dalam menangani persoalan eksploitasi pekerja anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alaminya. Pendekatan ini berfokus pada proses, makna, serta interaksi antaraktor yang terlibat. Melalui metode ini, peneliti berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan secara sistematis situasi, hubungan, serta dinamika yang muncul dalam peran International Labour Organization (ILO) dalam menangani eksploitasi pekerja anak di pertambangan kobalt Republik Demokratik Kongo.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal akademik, laporan organisasi internasional (ILO, UNICEF, dll.), dokumen kebijakan, artikel berita, dan publikasi online yang kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan peran ILO dalam menangani eksploitasi pekerja anak di pertambangan kobalt RDK, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Eksploitasi Pekerja Anak di Pertambangan Kobalt RDK

Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara dengan sumber daya mineral terkaya di dunia, namun pada saat yang sama termasuk dalam kelompok negara termiskin dengan indikator pembangunan manusia yang sangat rendah.¹⁰ Kombinasi warisan sejarah kolonial yang eksploitatif, konflik bersenjata berkepanjangan, tata kelola lemah, dan ketimpangan sosial-ekonomi ekstrem membentuk konteks struktural yang melanggengkan kerentanan pekerja anak.

Warisan eksploitasi sumber daya alam dari periode kolonial Belgia menciptakan pola ekstraktif yang tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Sejak akhir abad ke-19, wilayah yang kini menjadi RDK mengalami pola eksploitasi sumber daya dan kekerasan sistematis yang intensif. Konflik bersenjata yang berkepanjangan di wilayah timur RDK sejak era pasca-Mobutu hingga saat ini telah menyebabkan lebih dari 7,8 juta pengungsi internal, menciptakan kondisi kerentanan ekstrem yang memaksa keluarga melibatkan anak dalam ekonomi pertambangan demi bertahan hidup.¹¹

¹⁰ Dorothe Baumann-Pauly, "Cobalt Mining in the Democratic Republic of the Congo: Addressing Root Causes of Human Rights Abuses" (Center for Business and Human Rights, 2023)

¹¹ Hershey H. Friedman et al., "Is Greed Good? Learning Business Ethics from King Leopold II, Mass Murderer," accessed December 12, 2025, <https://ssrn.com/abstract=2617553>

Tata Kelola, Desentralisasi, dan Kapasitas Negara

Dalam konteks ketenagakerjaan dan perlindungan anak, kewenangan tersebar di antara beberapa kementerian (Tenaga Kerja, Pertambangan, Sosial, Pendidikan, Hak Asasi Manusia) tanpa koordinasi efektif, sehingga regulasi yang sudah relatif komprehensif seringkali tidak diikuti oleh implementasi yang konsisten di lapangan.¹² Kapasitas teknis dan sumber daya lembaga negara sangat terbatas bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.

Inspektorat tenaga kerja dan pertambangan beroperasi dengan jumlah personel yang jauh di bawah standar internasional, terkonsentrasi di kota besar, dan hampir tidak memiliki sarana transportasi maupun anggaran untuk menjangkau lokasi tambang artisanal terpencil. Korupsi sistemik yang mencapai tingkat sangat tinggi memperburuk lemahnya penegakan hukum, sehingga menciptakan kultur impunitas yang menguatkan praktik eksploitasi.

Ekonomi RDK dan Sektor Pertambangan Kobalt

Ekonomi RDK sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, terutama mineral, yang menyumbang lebih dari 90 persen pendapatan ekspor dan sekitar sepertiga produk domestik bruto.¹³ Namun, ketergantungan tinggi pada

komoditas primer ini tidak menghasilkan pembangunan inklusif—PDB per kapita tetap sangat rendah, tingkat kemiskinan ekstrem di atas 70 persen, dan ketimpangan sosial-ekonomi tajam terlihat dari konsentrasi kekayaan di tangan elite politik dan bisnis.

Pertambangan kobalt di RDK terbagi dalam dua model besar: operasi industri skala besar yang dikelola perusahaan multinasional, dan pertambangan artisanal dan skala kecil (ASM) yang melibatkan ratusan ribu penambang individu. Sektor ASM kobalt diperkirakan menyerap sekitar 200.000–255.000 penambang dewasa secara langsung, dengan jutaan anggota keluarga yang bergantung pada pendapatan tidak stabil dari aktivitas ini.¹⁴ ASM menyumbang sekitar 15–30 persen produksi kobalt RDK namun memiliki dampak sosial terbesar karena menjadi tumpuan hidup komunitas sangat miskin dan merupakan ruang utama terjadinya eksploitasi pekerja anak.¹⁵

Demografi, Migrasi, dan Kerentanan Sosial

RDK memiliki struktur demografis sangat muda, dengan hampir setengah penduduk berusia di bawah 15 tahun dan tingkat pertumbuhan populasi sekitar 3

¹² International Cocoa Initiative. 2023. *Child labour legislation in the Democratic Republic of Congo*. <https://www.cocoainitiative.org>

¹³ World Bank. 2021. *Cobalt in the Democratic Republic of Congo: Market analysis*. World Bank Group.

¹⁴ Baumann-Pauly, D. (2023). *Cobalt mining in the Democratic Republic of the Congo: Addressing root causes of human rights abuses*. Center for Business and Human Rights, NYU Stern School of Business. <https://www.stern.nyu.edu>

¹⁵ World Bank. (2023). *Democratic Republic of Congo economic update: Mining for development*. World Bank Group.

persen per tahun.¹⁶ Indeks Pembangunan Manusia berada di kelompok terendah dunia, harapan hidup rendah, dan jutaan anak hidup dalam kemiskinan multidimensi dengan akses terbatas terhadap nutrisi, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan berkualitas.¹⁷

Di wilayah tambang kobalt, arus migrasi internal yang kuat dari provinsi lain mendorong ledakan populasi di sekitar lokasi ASM, jauh melampaui kapasitas pemerintah lokal dalam menyediakan sekolah, fasilitas kesehatan, dan perlindungan sosial.¹⁸ Keluarga pengungsi dan migran sering tiba tanpa aset, jaringan sosial, atau dokumen identitas yang memadai, sehingga sulit mengakses layanan publik dan berada dalam posisi tawar sangat lemah di pasar kerja informal.¹⁹ Dalam situasi ini, anak-anak sering masuk ke tambang sebagai strategi bertahan hidup karena tidak ada pilihan lain.²⁰

¹⁶ United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023: Democratic Republic of Congo*. UNDP.

¹⁷ United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023: Democratic Republic of Congo*. UNDP.

¹⁸ Matthysen, K., Joossens, E., & Tsurukawa, N. (2023). *Analysis of the interactive map of artisanal mining areas in eastern Democratic Republic of Congo: 2023 update*. International Peace Information Service (IPIS). <https://ipisresearch.be>

¹⁹ Matthysen, K., Joossens, E., & Tsurukawa, N. (2023). *Analysis of the interactive map of artisanal mining areas in eastern Democratic Republic of Congo: 2023 update*. International Peace Information Service (IPIS). <https://ipisresearch.be>

²⁰ Baumann-Pauly, D. (2023). *Cobalt mining in the Democratic Republic of the Congo: Addressing root causes of human rights*

Pekerja Anak di Sektor Kobalt: Kondisi Kerja dan Dampak

Berbagai studi dan laporan memperkirakan terdapat sekitar 30.000–40.000 anak yang terlibat dalam rantai aktivitas pertambangan kobalt artisanal di provinsi Lualaba dan Haut-Katanga.²¹ Anak-anak ini terlibat dalam beragam tugas, mulai dari menggali bijih di dalam lubang sempit, mengangkut karung berat dari dasar pit ke permukaan, mencuci dan memilah bijih di sungai atau kolam, hingga aktivitas pendukung seperti menjual air atau makanan di sekitar lokasi tambang.

Kondisi kerja di pertambangan kobalt artisanal ditandai oleh jam kerja panjang, pekerjaan fisik berat, dan ketiadaan perlindungan standar ketenagakerjaan.²² Anak-anak sering mulai bekerja sejak pagi hingga sore atau malam, mengangkut karung bijih yang beratnya dapat mendekati atau melebihi berat badan mereka sendiri, bekerja di terowongan sempit tanpa penyangga memadai, dan tanpa alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, atau masker.²³

abuses. Center for Business and Human Rights, NYU Stern School of Business. <https://www.stern.nyu.edu>

²¹ Amnesty International. (2016). "This is what we die for": Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt (AFR 62/3183/2016).

²² Amnesty International. (2016). "This is what we die for": Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt (AFR 62/3183/2016). <https://www.amnesty.org>

²³ United States Department of Labor. (2023). *2022 findings on the worst forms of child labor: Congo, Democratic Republic of the (DRC)*. Bureau of International Labor Affairs, U.S. Department of

Secara kesehatan, anak-anak menghadapi risiko akut seperti runtutan terowongan, jatuh dari ketinggian, cedera akibat alat kerja, serta risiko kronis berupa gangguan pernapasan, masalah kulit, dan kelainan muskuloskeletal akibat paparan debu mineral dan beban berat yang terus-menerus.²⁴ Dari sisi pendidikan, banyak anak penambang putus sekolah sepenuhnya atau hanya bersekolah sporadis karena kelelahan, kebutuhan bekerja harian, dan persepsi keluarga bahwa pendapatan dari tambang lebih penting daripada pendidikan.²⁵

Faktor Penyebab dan Kerangka Hukum

Eksplotasi pekerja anak di pertambangan kobalt RDK merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Pada tingkat rumah tangga, kemiskinan ekstrem dan ketiadaan jaring pengaman sosial membuat kontribusi pendapatan anak dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keterbatasan akses dan kualitas pendidikan memperkuat kecenderungan ini. Migrasi internal dan pengungsian akibat konflik menambah kerentanan.

Labor. <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/congo-drc>

²⁴ United States Department of Labor. (2023). *2022 findings on the worst forms of child labor: Congo, Democratic Republic of the (DRC)*. Bureau of International Labor Affairs, U.S. Department of Labor. <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/congo-drc>

²⁵ United States Department of Labor. (2022). *Final evaluation: Combatting child labor in the Democratic Republic of the Congo's cobalt industry (COTECCO)*. Bureau of International Labor Affairs, U.S. Department of Labor. <https://www.dol.gov>

RDK telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 sejak tahun 2001, dan memiliki kerangka hukum nasional yang melarang pekerja anak di pertambangan. Namun, implementasi kerangka hukum ini menghadapi hambatan struktural serius: anggaran domestik sangat terbatas, kapasitas teknis lembaga pelaksana rendah, koordinasi antar lembaga sering lemah, dan ketergantungan tinggi pada pendanaan donor membuat banyak intervensi bersifat proyek jangka pendek dengan cakupan geografis sempit dibandingkan skala masalah.²⁶

Gambaran Umum International Labour Organization (ILO)

International Labour Organization (ILO) merupakan organisasi yang berada di bawah naungan PBB yang banyak mengatasi permasalahan tentang pekerjaan agar terciptanya ruang kerja yang layak, adil, aman, dan bebas bagi laki-laki maupun perempuan.²⁷ ILO memiliki legitimasi unik dan kuat dalam tata kelola global sebagai badan khusus (*specialized agency*) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat spesifik untuk menetapkan standar ketenagakerjaan internasional.

²⁶ International Cocoa Initiative. (2023). *Child labour legislation in the Democratic Republic of Congo: An analysis of the legislative context and national policies in the Democratic Republic of Congo (DRC) relating to the protection of children against child labour*. <https://www.cocoainitiative.org>

²⁷ International Trade Union Confederation ITUC. *Internationally recognised core labour standards in the Democratic Republic of Congo*.

ILO memiliki tiga struktur utama: Konferensi Buruh Internasional (ILC) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, Badan Pengurus (*Governing Body*) sebagai dewan eksekutif, dan Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*) sebagai sekretariat permanen yang melaksanakan program operasional. Struktur tripartit yang unik—melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja—membedakan ILO dari organisasi internasional lain dan memberikan legitimasi kuat bagi keputusan dan standar yang dihasilkan.

Sistem Kerja ILO: Mekanisme Pengawasan dan Tripartit

ILO menjalankan sistem kerja melalui mekanisme pengawasan yang ketat terhadap negara anggota. Mekanisme ini mencakup *Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations* (CEACR) yang mengevaluasi laporan berkala negara anggota mengenai penerapan konvensi yang telah diratifikasi.²⁸ ILO juga menggunakan sistem tripartit dan dialog sosial sebagai metode implementasi kebijakan di tingkat nasional, yang memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Kerangka Normatif Pekerja Anak: Konvensi ILO No. 138 dan No. 182

ILO menetapkan kerangka normatif perlindungan anak melalui dua konvensi inti. Konvensi ILO No.

138 tentang Usia Minimum Bekerja menetapkan standar usia dasar 15 tahun bagi anak untuk masuk ke dunia kerja, dengan pengecualian bagi pekerjaan ringan (*light work*) untuk anak usia 13 hingga 15 tahun, dengan syarat pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesehatan dan sekolah mereka.²⁹

Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Worst Forms of Child Labour*) memasukkan pertambangan sebagai pekerjaan berbahaya (*hazardous work*).³⁰ Berdasarkan Konvensi ILO No. 182, pekerjaan di pertambangan dikategorikan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak karena sifatnya yang berbahaya dan dapat merusak kesehatan, keselamatan, dan moral anak.

Program ILO untuk Eliminasi Pekerja Anak: IPEC, COTECCO, dan GALAB

ILO mengembangkan International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) sebagai kerangka kerja global untuk penghapusan pekerja anak.³¹ IPEC diluncurkan tahun 1992 dan kini beroperasi di lebih dari 90 negara dengan fokus pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk seperti yang didefinisikan Konvensi No. 182, termasuk perbudakan, prostitusi,

²⁹ ILO, "Convention C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)," <https://normlex.ilo.org>

³⁰ ILO, "Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)," <https://normlex.ilo.org>

³¹ International Labour Organization. 2019. *About the International Programme on Elimination of Child Labour*. <https://www.ilo.org/ipec>

²⁸ International Trade Union Confederation ITUC. *Internationally recognised core labour standards in the Democratic Republic of Congo*.

kegiatan ilegal, dan pekerjaan berbahaya. Strategi multi-sektoral IPEC meliputi penguatan kerangka hukum dan kebijakan, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, penarikan langsung anak dari pekerjaan berbahaya dan rehabilitasi, dukungan ekonomi keluarga, perluasan akses pendidikan, serta kampanye sosial untuk mengubah norma yang mentolerir pekerja anak.

Di RDK, ILO melaksanakan program COTECCO (Combating Child Labor in the Cobalt Supply Chain) yang berjalan pada periode 2018-2022 dengan pendanaan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat sebesar 2,5 juta dolar AS. Program ini tidak hanya berfokus pada pelarangan represif, tetapi berusaha membangun sistem pemantauan pekerja anak berbasis komunitas (Child Labour Monitoring and Remediation Systems/CLMRS).³² COTECCO berhasil menarik 1.527 anak dari pekerjaan berbahaya dan mencegah 6.464 anak memasuki pekerja anak, melatih lebih dari 200 guru, memperbaiki atau membangun sekitar 40 sekolah, mendukung diversifikasi mata pencaharian bagi lebih dari 1.000 keluarga, serta melatih sekitar 50 inspektur tenaga kerja.

Pada tahun 2024, ILO memperluas upayanya dengan meluncurkan proyek GALAB (Global Action against Child Labour) yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sosial dan sistem pemantauan di rantai pasok kobalt,

serta menyediakan layanan remediasi langsung berupa paket jembatan pendidikan, pelatihan vokasi bagi remaja, dan dukungan mata pencaharian bagi keluarga.³³ GALAB bekerja sama dengan UNICEF, IMPACT Transform, dan PABEA-Cobalt untuk menyediakan dukungan pendidikan, pelatihan vokasional, dan kegiatan peningkatan pendapatan bagi keluarga.

Program Pendukung: SCREAM dan Advokasi Hukum

Selain program utama, ILO menjalankan program SCREAM (Supporting Children's Rights through Education, the Arts, and the Media) yang bertujuan memberdayakan anak-anak agar dapat menyuarakan pengalaman dan pandangan mereka mengenai pekerja anak melalui seni, pendidikan, dan media. Di Lubumbashi, misalnya, siswa sekolah menggunakan seni untuk menggambarkan bahaya tambang dan menegaskan bahwa anak seharusnya berada di sekolah, bukan di pertambangan.³⁴

ILO juga berperan penting dalam memperkuat sistem keadilan dan penegakan hukum RDK terkait eksploitasi pekerja anak. ILO memberikan pelatihan bagi hakim, jaksa, dan aparat kepolisian mengenai standar internasional perlindungan anak, teknik investigasi kasus pekerja anak, dan penerapan

³² United States Department of Labor, *FINAL EVALUATION: COMBATING CHILD LABOR (COTECCO)*, 2022

³³ Reliefweb, "ILO Launches GALAB Project," November 20, 2024, <https://reliefweb.int>

³⁴ International Labour Organization. (2019). *About the International Programme on Elimination of Child Labour (IPEC)*. <https://www.ilo.org/ipecc>

hukum nasional yang melarang pekerjaan berbahaya bagi anak.³⁵

Konsep Pekerjaan yang Layak dan Perlindungan Sosial

Konsep pekerjaan yang layak (*decent work*) yang dikembangkan ILO mencakup empat pilar: penciptaan lapangan kerja produktif, perlindungan hak di tempat kerja, perluasan perlindungan sosial, dan promosi dialog sosial. Konsep ini menekankan bahwa kualitas pekerjaan sama pentingnya dengan kuantitas, mencakup aspek upah yang adil, kondisi kerja yang aman, jaminan sosial yang memadai, dan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan kerja mereka.³⁶

Di RDK, proyek *Building Social Protection Floors for All* berfokus pada perluasan perlindungan kesehatan sosial dan implementasi Universal Health Coverage (UHC). ILO mendukung pemerintah dalam merancang arsitektur sistem UHC dan mengoperasikan Dana Solidaritas Kesehatan.³⁷ Di wilayah pertambangan kobalt, program transfer tunai kepada keluarga miskin menjadi instrumen penting untuk

mengurangi ketergantungan ekonomi mereka pada pendapatan anak dari pekerjaan di tambang.³⁸

Kehadiran ILO di RDK dan Dasar Legalitasnya

Kehadiran ILO di RDK dimulai sejak negara ini merdeka dan menjadi anggota ILO pada tahun 1960. Selama lebih dari enam dekade, ILO berperan mendukung pembangunan sistem ketenagakerjaan RDK, meski upaya ini sering terganggu konflik bersenjata, instabilitas politik, dan krisis ekonomi.³⁹ Legalitas kehadiran dan aktivitas ILO di RDK berakar pada keanggotaan negara ini dalam ILO dan ratifikasi konvensi-konvensi utama terkait pekerja anak.⁴⁰

Sebagai negara anggota sejak 1960, RDK menerima kewajiban yang termaktub dalam Konstitusi ILO, termasuk kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, dan mewujudkan prinsip dan hak fundamental di tempat kerja.⁴¹ Ratifikasi Konvensi No. 138 dan No. 182 pada tahun 2001 menciptakan

³⁵ United States Department of Labor. (2022). *Final evaluation: Combatting child labor in the Democratic Republic of the Congo's cobalt industry (COTECCO)*. Bureau of International Labor Affairs, U.S. Department of Labor. <https://www.dol.gov>

³⁶ Standing, G. (2010). The International Labour Organization. *New Political Economy*, 15(2), 307–318. <https://doi.org/10.1080/13563460903290961>

³⁷ International Labour Organization. (2024a). *Building social protection floors for all: Democratic Republic of Congo*. ILO Office for Democratic Republic of Congo.

³⁸ International Labour Organization. (2024a). *Building social protection floors for all: Democratic Republic of Congo*. ILO Office for Democratic Republic of Congo.

³⁹ G. Pollaczek, "The United Nations and Specialized Agencies," *The American Journal of International Law*, 40(3), 1946: 592–619

⁴⁰ International Trade Union Confederation. (2010). *Internationally recognised core labour standards in the Democratic Republic of Congo: Report for the WTO General Council review of the trade policies of the Democratic Republic of Congo* (Geneva, 24 and 26 November 2010). <https://www.ituc-csi.org>

⁴¹ Standing, G. (2010). The International Labour Organization. *New Political Economy*, 15(2), 307–318. <https://doi.org/10.1080/13563460903290961>

kewajiban hukum internasional bagi RDK untuk menghapus pekerja anak, menetapkan usia minimum bekerja, melarang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dan melaporkan secara berkala kepada ILO.⁴²

Peran ILO Dalam Menciptakan dan Menyebarkan Norma Global

Dalam kerangka teori organisasi internasional otonom yang dikemukakan oleh Barnett dan Finnemore, fungsi fundamental pertama yang dijalankan oleh ILO adalah penciptaan dan penyebaran norma global. Di wilayah pertambangan seperti Provinsi Lualaba dan Haut-Katanga, batas antara pendidikan vokasi tradisional—di mana anak belajar keterampilan menambang dari orang tua—dan eksploitasi ekonomi seringkali menjadi bias akibat desakan kemiskinan struktural.

Peran normatif ILO dalam periode 2018-2024 diterjemahkan ke dalam spesifikasi norma teknis yang harus diadopsi oleh sistem hukum RDK. ILO secara aktif menanamkan norma larangan absolut pada sektor berbahaya, menegaskan bahwa pertambangan rakyat atau ASM masuk dalam kategori Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sesuai Konvensi Nomor 182.⁴³ ILO menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan aktor lokal dengan

menolak argumen "pekerjaan ringan" di sektor ini, mengingat risiko paparan debu logam berat, longsor, dan beban fisik ekstrem menjadikan pertambangan sebagai zona terlarang mutlak bagi siapa pun di bawah usia 18 tahun.

Selain itu, ILO juga mendorong integrasi Target Sustainable Development Goals (SDGs) 8.7 ke dalam Rencana Pembangunan Nasional RDK, yang mewajibkan negara memprioritaskan pendidikan dasar gratis sebagai solusi jangka panjang penghapusan pekerja anak. Hasil nyata dari peran normatif ini adalah terjadinya harmonisasi hukum yang signifikan di RDK. Tekanan normatif yang konsisten dari ILO mendorong Pemerintah RDK untuk merevisi dan mempertegas Daftar Pekerjaan Berbahaya Nasional

Peran ILO Dalam Mengatur dan Menilai Tindakan Negara

Dalam kurun waktu penelitian, ILO secara rutin melakukan evaluasi mendalam terhadap laporan berkala yang dikirimkan pemerintah RDK mengenai penerapan Konvensi Nomor 138 dan 182.⁴⁴ Tim ahli ILO membedah laporan pemerintah dan membandingkannya dengan data pembandingan dari serikat pekerja atau organisasi non-pemerintah. Ketika ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian, ILO menggunakan wewenangnya untuk menerbitkan komentar resmi atau *Direct Request* yang bersifat mendesak.

⁴² International Trade Union Confederation. (2010). *Internationally recognised core labour standards in the Democratic Republic of Congo: Report for the WTO General Council review of the trade policies of the Democratic Republic of Congo* (Geneva, 24 and 26 November 2010). <https://www.ituc-csi.org>

⁴³ International Trade Union Confederation. 2010. *Core labour standards in DRC*. <https://www.ituc-csi.org>

⁴⁴ G. Pollaczek, "The United Nations and Specialized Agencies," *The American Journal of International Law*, 40(3), 1946: 592-619

ILO secara konsisten mengkritisi minimnya jumlah inspektur tambang di provinsi penghasil kobalt dan ketiadaan data terpilah mengenai pekerja anak. Kritik ini bukan sekadar opini politik, melainkan penilaian berbasis data teknis yang sulit dibantah, sehingga menciptakan tekanan epistemik bagi pemerintah RDK. Dampak dari fungsi pengawasan ini terlihat jelas pada perubahan sikap pemerintah RDK dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya pemerintah cenderung defensif dan menutup diri, tekanan data yang disajikan ILO membuat mereka lebih terbuka mengakui keberadaan masalah

Peran ILO Mengisi Kekosongan Institusional Negara

Implementasi peran operasional ini terwujud melalui serangkaian program teknis komprehensif seperti COTECCO (*Combatting Child Labor in the Cobalt Supply Chain*) yang berjalan pada periode 2018-2022 dengan pendanaan dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Melalui COTECCO, ILO turun langsung ke basis komunitas untuk membangun Child Labour Monitoring and Remediation Systems (CLMRS).⁴⁵ Sistem ini melatih tokoh masyarakat, guru, dan pemimpin lokal untuk menjadi pemantau aktif yang mengidentifikasi anak-anak di area tambang.

Selain itu, ILO juga mengisi kekosongan dalam edukasi sosial melalui program SCREAM (*Supporting Children's Rights*

through Education, the Arts, and the Media). Kurikulum sekolah formal di RDK belum memadai dalam mengajarkan hak-hak anak secara mendalam. Program SCREAM mengisi celah ini dengan memberdayakan anak-anak dan pemuda melalui media seni untuk memahami hak mereka dan berani menolak eksploitasi.

Pada tahun 2024, ILO meluncurkan inisiatif GALAB (*Global Action against Child Labour*) yang fokus pada penyediaan layanan remediasi langsung. Program ini menyediakan paket jembatan pendidikan atau sekolah transisi dan pelatihan vokasi bagi remaja, serta dukungan mata pencaharian bagi keluarga. Evaluasi program menunjukkan bahwa di area target intervensi, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat yang signifikan dan ILO berhasil menarik 1.527 anak dari tambang serta mencegah 6.464 anak lainnya memasuki sektor pertambangan.⁴⁶

Dampak Intervensi ILO di RDK

Berdasarkan temuan penelitian, peran ILO di RDK terbukti efektif secara kualitatif dan institusional dalam mengubah lanskap penanganan pekerja anak menjadi lebih manusiawi dan terstruktur, meskipun tantangan kuantitatif masih menghadang. Secara kualitatif, kehadiran ILO telah mengubah pendekatan penanganan masalah dari pembiaran atau tindakan represif semata menjadi penanganan yang lebih manusiawi dan berpusat pada hak anak. ILO berhasil melembagakan

⁴⁵ United States Department of Labor, COTECCO, 2022

⁴⁶ Charles Bornand, "Child Labor in Cobalt Mining," *Planet Keeper*, October 1, 2025, <https://planetkeeper.info>

pendekatan yang menekankan bahwa penarikan anak dari tambang tidak boleh dilakukan dengan kekerasan yang justru memiskinkan keluarga, melainkan harus melalui remediasi, pendidikan, dan pemberdayaan.

Mekanisme kerjasama yang dibangun antara ILO dan Pemerintah RDK melalui pendekatan tripartit menjadi kunci keberlanjutan intervensi ini. Meskipun terdapat tantangan berupa lemahnya koordinasi antar-kementerian dan korupsi sistemik, strategi ILO untuk melembagakan sistem pemantauan dan membangun kapasitas lokal (*capacity building*) telah menciptakan fondasi bagi kemandirian jangka panjang.

Namun, efektivitas ILO tetap memiliki batasan yang perlu diakui secara objektif. Skala masalah pekerja anak di tambang kobalt yang melibatkan puluhan ribu anak adalah tantangan masif yang tidak mungkin diselesaikan sepenuhnya hanya oleh satu rangkaian proyek organisasi internasional. Efektivitas jangkauan program ILO dibatasi oleh besaran pendanaan dan luasnya wilayah RDK. Meskipun demikian, peran ILO sangat vital sebagai katalisator perubahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran International Labour Organization (ILO) dalam menangani eksploitasi pekerja anak di pertambangan kobalt Republik Demokratik Kongo (RDK) periode 2018–2024 melampaui fungsi teknis semata, melainkan bermanifestasi sebagai aktor otonom yang secara aktif mengonstruksi norma, mengawasi kepatuhan, dan mengisi kekosongan negara (*filling the gap*)

di tengah kegagalan sistemik domestik. Berdasarkan analisis menggunakan teori organisasi internasional Barnett dan Finnemore, intervensi ILO terbukti efektif secara kualitatif dan institusional dalam mengubah lanskap penanganan pekerja anak dari pendekatan represif-sporadis menjadi pendekatan berbasis hak dan sistemik, meskipun tantangan struktural seperti kemiskinan ekstrem dan instabilitas politik masih membatasi efektivitas kuantitatif secara menyeluruh.

Pertama, dalam fungsi penciptaan dan penyebaran norma (*norm-setting*), ILO berhasil mentransformasi diskursus pekerja anak di RDK dari isu ekonomi keluarga menjadi isu pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kedua, dalam fungsi pengawasan (*rule-supervising*), ILO menjalankan kekuasaan epistemik melalui mekanisme Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) untuk menciptakan transparansi paksa. Ketiga, fungsi mengisi kekosongan institusional (*filling the gap*) merupakan kontribusi paling signifikan dan operasional dari ILO melalui program COTECCO dan GALAB.

Keberhasilan menarik 1.527 anak dari zona bahaya dan mencegah 6.464 anak lainnya masuk ke sektor pertambangan menunjukkan bahwa intervensi langsung ILO memberikan dampak kemanusiaan yang nyata. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi batas-batas kekuasaan organisasi internasional: ILO dapat memberikan solusi teknis dan normatif, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran

negara dalam menyelesaikan akar masalah struktural seperti kemiskinan massal dan konflik bersenjata yang menjadi pemicu utama suplai pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2016). *"This is what we die for": Human rights abuses in the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt* (AFR 62/3183/2016). <https://www.amnesty.org>
- Archer, C. (2002). *International organisations*. Routledge.
- Barnett, M., & Finnemore, M. (2004). *Rules for the world: International organizations in global politics*. Cornell University Press.
- Baumann-Pauly, D. (2023). *Cobalt mining in the Democratic Republic of the Congo: Addressing root causes of human rights abuses*. Center for Business and Human Rights, NYU Stern School of Business. <https://www.stern.nyu.edu>
- Bornand, C. (2025, October 1). Child labor in cobalt mining: Exploitation amid the green energy boom in the Democratic Republic of Congo. *Planet Keeper*. <https://planetkeeper.info>
- Checkel, J. T. (1998). The constructivist turn in international relations theory. *World Politics*, 50(2), 324–348. <https://doi.org/10.1017/S0043887100008133>
- Cobalt Institute. (n.d.). *Artisanal and small-scale mining*. <https://www.cobaltinstitute.org/artisanal-and-small-scale-mining>
- Democratic Republic of the Congo corruption perceptions - Transparency International. (n.d.). *TheGlobalEconomy.Com*. https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/transparency_corruption
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Friedman, H. H., Friedman, L. W., & Amoo, T. (n.d.). Is greed good? Learning business ethics from King Leopold II, mass murderer. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2617553>
- International Cocoa Initiative. (2023). *Child labour legislation in the Democratic Republic of Congo: An analysis of the legislative context and national policies in the Democratic Republic of Congo (DRC) relating to the protection of children against child labour*. <https://www.cocoainitiative.org>
- International Crisis Group. (n.d.). *Katanga: Tensions in DRC's mineral heartland*. <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/democratic-republic-congo/239-katanga-tensions-drcs-mineral-heartland>

- International Labour Organization. (1973). *Convention C138 - Minimum Age Convention, 1973* (No. 138). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_COD E:C138
- International Labour Organization. (1999). *Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999* (No. 182). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_COD E:C182
- International Labour Organization. (2011). *ILO encyclopaedia of occupational health and safety*. <https://www.iloencyclopaedia.org>
- International Labour Organization. (2019). *About the International Programme on Elimination of Child Labour (IPEC)*. <https://www.ilo.org/ipec>
- International Labour Organization. (2024a). *Building social protection floors for all: Democratic Republic of Congo*. ILO Office for Democratic Republic of Congo.
- International Labour Organization. (2024b). *GALAB project document: Global action against child labour in cobalt mining supply chains in the Democratic Republic of Congo*. ILO Office for Democratic Republic of Congo.
- International Trade Union Confederation. (2010). *Internationally recognised core labour standards in the Democratic Republic of Congo: Report for the WTO General Council review of the trade policies of the Democratic Republic of Congo* (Geneva, 24 and 26 November 2010). <https://www.ituc-csi.org>
- Kamaliyah, A. (2023, August 11). Tentang kobalt yang bikin crazy rich Kongo hidup mentereng. *Detik.com*. <https://inet.detik.com>
- Kearney, A., & Sebrell, N. (2022, October 6). The cobalt conundrum: Net zero necessity vs supply chain concerns. *ISS Governance Insights*. <https://insights.issgovernance.com>
- Law Gratis. (n.d.). *Constitutional law at DR Congo*. <https://lawgratis.com/blog-detail/constitutional-law-at-dr-congo>
- Mas'ood, M. (1993). *Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. LP3ES.
- Matthysen, K., Joossens, E., & Tsurukawa, N. (2023). *Analysis of the interactive map of artisanal mining areas in eastern Democratic Republic of Congo: 2023 update*. International Peace Information Service (IPIS). <https://ipisresearch.be>
- Muimba-Kankolongo, A., Kampemba, F. M., Carlson, L., Van Straaten, P., Idung, J., Wendt, J., Mwinde, R., & Geelhoed, G. (2022). Impacts of trace metals pollution of water, food crops, and ambient air on population health in Zambia and the DR Congo. *Journal of Environmental and*

- Public Health*, 2022, 4515115.
<https://doi.org/10.1155/2022/4515115>
- Negara Republik Demokrasi Kongo - Geografi.Org. (n.d.).
<https://www.geografi.org/2017/11/negara-republik-demokrasi-kongo.html>
- Pollaczek, G. (1946). The United Nations and specialized agencies. *ILO Encyclopaedia*.
<https://www.iloencyclopaedia.org/part-iii-48230/resources-institutional-structural-and-legal/international-governmental-and-non-governmental-safety-and-health/item/224-the-united-nations-and-specialized-agencies>
- Reliefweb. (2024, November 20). *ILO launches GALAB project in Democratic Republic of the Congo to address child labour in cobalt mining sector*.
<https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/ilo-launches-galab-project-democratic-republic-congo-address-child-labour-cobalt-mining-sector>
- Salama, O. (2025, May 27). The current state of child labour in cobalt mines in the Democratic Republic of the Congo. *Humanium*.
<https://www.humanium.org/en/child-labour-cobalt-mines-drc>
- Save The Children. (2024, November 4). *DRC cobalt mines, child labour and the green transition*.
<https://www.savethechildren.net/blog/drc-cobalt-mines-child-labour-and-green-transition>
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali.
- Standing, G. (2010). The International Labour Organization. *New Political Economy*, 15(2), 307–318.
<https://doi.org/10.1080/13563460903290961>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023: Democratic Republic of Congo*. UNDP.
- United States Department of Labor. (2022). *Final evaluation: Combatting child labor in the Democratic Republic of the Congo's cobalt industry (COTECCO)*. Bureau of International Labor Affairs, U.S. Department of Labor.
<https://www.dol.gov>
- United States Department of Labor. (2023). *2022 findings on the worst forms of child labor: Congo, Democratic Republic of the (DRC)*. Bureau of International Labor Affairs, U.S. Department of Labor.
<https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/congo-drc>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
<https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>

Wilson Center. (n.d.). *Author Hochschild recounts lost history of horror in the Belgian Congo.*

<https://www.wilsoncenter.org/article/author-hochschild-recounts-lost-history-horror-the-belgian-congo>

World Bank. (2023). *Democratic Republic of Congo economic update: Mining for development.* World Bank Group.